

# MK Dinilai Mulai Kembali Menata Diri Setelah Diobrak-abrik Rezim Jokowi

Category: Hukum

written by Redaksi | 02/01/2025



**ORINEWS.id** – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional diapresiasi pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar.

Putusan MK ini menegaskan bahwa semua partai [Politik](#) peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa ada syarat persentase tertentu.

Sosok yang akrab disapa Uceng ini menilai langkah MK sebagai bentuk perbaikan, setelah sempat dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi.

“MK memang sedang menata diri, memperbaiki kesalahan setelah membiarkan dirinya diobrak-abrik oleh rezim sebelumnya ([Joko](#)

[Widodo](#)), oleh hakim-hakim yang saya sebut hakim-politisi,” kata Uceng, seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Kamis (2/1/2025).

Dengan pembatalan presidential threshold, MK dinilai mulai mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Zainal berharap MK terus memperkuat independensinya dan menjadikan prinsip demokrasi sebagai landasan utama setiap putusan.

“Putusan menghapuskan presidential threshold adalah kabar sejuk yang datang terlambat,” ujar Zainal.

Sebelumnya MK dinilai telah membuat putusan kontroversial. Salah satunya adalah Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang mengubah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Norma tersebut awalnya mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Namun, dalam putusan itu, MK menambahkan ketentuan bahwa usia minimal tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang menjabat sebelumnya.

Putusan ini dianggap kontroversial karena dinilai memberikan jalan bagi [Gibran Rakabuming Raka](#), putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri pada [Pilpres 2024](#). Saat itu, Ketua MK dijabat oleh Anwar Usman yang notabene adalah ipar Presiden [Jokowi](#), sehingga memunculkan tuduhan konflik kepentingan. []